PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP



KECAMATAN LOCERET

TAHUN
2025

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LOCERET

Jl. Raya Kediri Nomor 171 Telp.(0358)322264

KATA P ENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat bimbingan dan rahmat-Nya, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP Tahun 2025 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk telah disusun secara sistematis yang memuat tentang program/kegiatan, namun demikian alur pelaporan akuntabilitas ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan yang terdapat dalam laporan ini kami mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan LKjIP tahun 2025. Kami berharap bahwa LKjIP ini tetap dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya pihak eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya LKjIP ini dapat dijadikan acuan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada masa-masa mendatang.

Loceret, 5 Februari 2026
Camat Loceret

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP. 196908071990031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DA FTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang / Gambaran Umum 1
B. Landasan Hukum 3
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 3
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi ... 5
E. Sistematika Penulisan 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Ikhtisar Ringkasan Rencana Strategis Organisasi 7
B. Perjanjian Kinerja 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Organisasi 12
3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) 13
3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Tahun-tahun sebelumnya 15
3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra 17
3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/kabupaten yang berbatasan) 19
3.A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21
3.A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian Kinerja 22
B. Realisasi Anggaran 26

BAB IV PENUTUP 30
A. Kesimpulan 30
B. Saran 30

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penduduk Kecamatan Loceret 2
2. Tabel 2.1 Sasaran Strategis, indikator dan target kinerja tahun 2025..... 9
3. Tabel 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 13
4. Tabel 3.1.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n) dan Tahun (n-1, n-2) 15
5. Tabel 3.1.3.1 Target Kinerja Renstra 17
6. Tabel 3.1.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (n) dengan Target Akhir Renstra 17
7. Tabel 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan Standard Nasional 19
8. Tabel 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 19
9. Tabel 3.1.6 Analisis Penggunaan Sumber Daya 21
10. Tabel 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan 22
11. Tabel 3.2 Realisasi Anggaran 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.A. Latar Belakang / Gambaran Umum

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Loceret mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029 Kecamatan Loceret. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Loceret merupakan penjabaran dari Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

Kecamatan Loceret merupakan satu dari 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Loceret dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan Loceret memiliki luas wilayah 68,69 KM2 dengan Desa yang terjauh dari Kecamatan Loceret adalah Desa Bajulan yaitu 18 Km dengan ketinggian dari permukaan laut 1700 m diatas permukaan laut. Kecamatan Loceret mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nganjuk.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pace.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri.
- Sebelah Barat berbatasan langsung Kecamatan Berbek.

Secara administratif, Kecamatan Loceret terdiri dari 22 desa yaitu:

Tabel 1

NO	DESA	NO	DESA
1.	Bajulan	12.	Putukrejo
2.	Macanan	13.	Nglaban
3.	Genjeng	14.	Tanjungrejo
4.	Karangsono	15.	Sombron
5.	Ngepeh	16.	Kwagean
6.	Jatirejo	17.	Sukorejo
7.	Godean	18.	Gejagan
8.	Loceret	19.	Candirejo
9.	Patihan	20.	Mungkung
10.	Sekaran	21.	Teken Glagahan
11.	Bajulan	22.	Tempel Wetan

Tabel 2
Penduduk Kecamatan Loceret

Sedangkan jumlah penduduk 78.396 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Desa	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
1	Bajulan	2974	2908	5882
2	Macanan	3372	3228	6600
3	Genjeng	1608	1582	3190
4	Karangsono	1501	1458	2959
5	Ngepeh	3694	3575	7269
6	Godean	1604	1570	3174
7	Patihan	1521	1543	3064
8	Sekaran	1387	1375	2762
9	Loceret	1118	1151	2269
10	Jatirejo	1038	1054	2092
11	Tempel Wetan	810	813	1623
12	Tekenglagahan	1452	1432	2884
13	Mungkung	1523	1497	3020
14	Gejagan	1437	1438	2875
15	Candirejo	1940	2000	3940
16	Sukorejo	2140	2222	4362
17	Kwagean	2321	2336	4657
18	Kenep	1178	1124	2302
19	Putukrejo	1232	1250	2482
20	Nglaban	2738	2733	5471
21	Sombron	782	785	1567
22	Tanjungrejo	1978	1974	3952
JUMLAH		**39348**	**39048**	**78396**

Sumber : Kecamatan Loceret Dalam Angka 2024

1.B. Landasan Hukum

a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;

b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
d) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2026;
e) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
f) Surat Edaran Bupati Nganjuk Tanggal 5 Januari 2026 Nomor: 000.8.6.3/67/411.000/2026 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

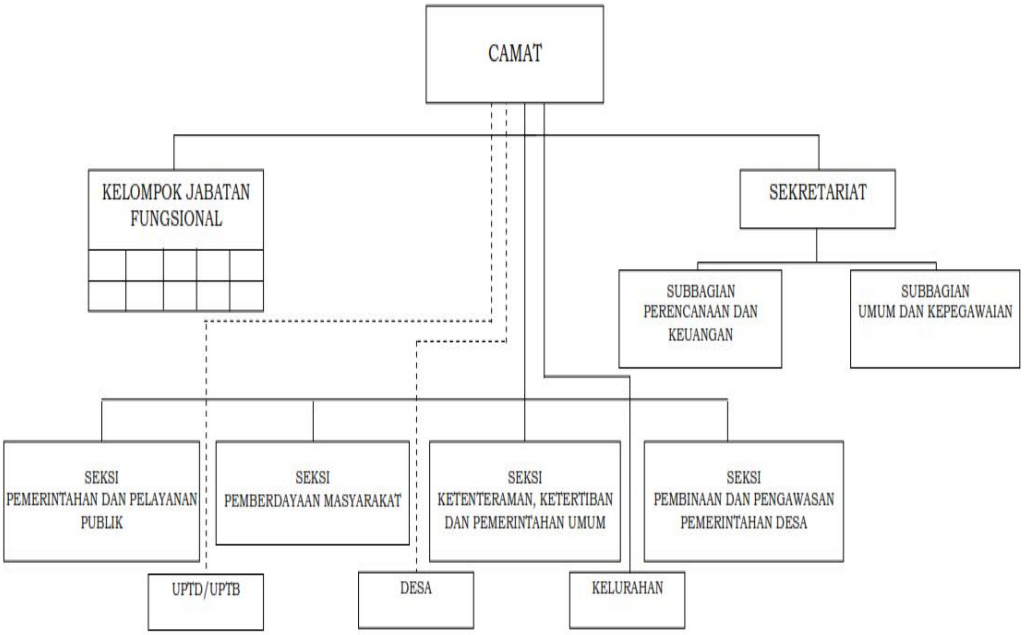
1.C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Sekretariat, terdiri atas:
   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Seksi, terdiri atas:
   1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
   2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
   3. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum; dan
   4. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
c. Kelurahan; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



Sedangkan Rincian Tugas Dan Fungsi Camat adalah :

I. Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

II. Fungsi

Camat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1.D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Loceret diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada RPD Kabupaten Nganjuk 2025-2026, sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan

prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Sinergitas Kecamatan*.

Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Loceret guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan Permasalahan Utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan Loceret

1) Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
2) Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggung jawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
3) Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif
4) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5) Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
6) Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

1.E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam pelaporan LKjIP 2025, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang / Gambaran Umum
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
D. Isu Strategis (strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Organisasi
B. Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis pemerintah Kecamatan Loceret merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026 periode 4 dari RPJPD 2005-2025. Tujuan RPJMD tersebut adalah Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang maju, adil, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif yang didukung sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sedangkan untuk Pemerintahan Kecamatan Loceret akan menuangkan tujuan RPJMD tersebut dalam Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Adapun *Tujuan* Kecamatan Loceret adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan*.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan
   Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Loceret
(Renstra 2024 – 2026)

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target			Target Akhir Periode Renstra
			2025	2026			2025	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerinta han kecamatan	70,83	84	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,83	83	83,20	84	84
					Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	60%	100 %	100 %	100 %	100%

Penyelarasan/ sinkronisasi antara visi dan misi Bupati Nganjuk dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Loceret merupakan langkah krusial agar pembangunan daerah tidak berjalan sendiri sendiri. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk periode 2025- 2029 visi misi Bupati Nganjuk adalah “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menetapkan tujuh misi pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban
2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

4. Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
5. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi local
6. Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna
7. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local

Dengan menetapkan Visi dan Misi Kabupaten tersebut diatas lahirah 15 Program Prioritas pembanguanan. Dari 15 program prioritas yang ditetapkan beberapa sikron dengan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Loceret. Proses sinkronisasi antara visi misi Bupati dengan Rencana strategis Kecamatan merupakan langkah krusial agar pembangunan di Kabupaten Nganjuk berjalan selaras dari level pimpinan tertinggi hingga ke level wilayah.

Melalui sinkronisasi ini, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra ini bukan sekedar tugas administrative, melainkan kontribusi langsung terhadap indikator kinerja utama Kabupaten Nganjuk. Dengan semangat gotong royong Kecamatan Loceret siap menjadi mesin penggerak bagi terwujudnya masyarakat Nganjuk yang lebih maju dan berdaya saing.

Kecamatan Loceret berperan sebagai eksekutor pencapaian visi bupati melalui strategi ‘ Bersinergi’ melalui tujuan dalam IKU renstra 2025-2029 yaitu Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan. Pencapaian visi yang baik dengan menerapkan sinegitas yang baik di Intern Kecamatan dengan Desa dan Instansi terkait. Dimana Kecamatan adalan jembatan koordinasi antara Instansi vertical, Badan Dinas dan Kantor dengan Desa.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loceret Periode 2025-2029 merupakan komitmen nyata dalam menerjemahkan visi besar Bupati Nganjuk.Keberhasilan pencapaian visi daerah sangat bergantung pada efektivitas eksekusi program di level kewilayahan. Oleh karena itu ditetapkan tujuan dan sasaran pada IKU Renstra Kecamatan Loceret.

Matrik Penyelarasan (cascading) Visi/ Misi Bupati Nganjuk diturunkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kecamatan Loceret :

Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Keterangan
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan		
Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Pelayanan pada Kecamatan berkaitan dengan hak dasar warga negara antara lain SKTM, Perekaman KTP berdampak langsung pada kecepatan warga untuk medapatkan bantuan Pendidikan, bantuan social dan bantuan kesehatan. Pelayanan yang bagus juga memberikan rasa percaya dan dukungan penuh masyarakat dalam birokrasi pemerintahan di Kecamatan tanpa aduan, complain bahkan amarah masyarakat.
Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Lingkungan Wilayah yang tertib dan aman adalah magnet bagi aktivitas ekonomi masyarakat,solidaritas masyarakat tercipta dengan baik, kesehatan mental dan psikologis masyarakat lebih terjaga karena tenang dalam beraktifitas di ruang public.
Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui		Meningkatnya tertib administrasi desa	Meningkatkan tertib administrasi desa yang akuntabel,rapi dan transparan memberi rasa percaya masyarakat dalam birokrasi pemerintahan desa sehingga dukungan penuh pada pembangunan

penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan			pemerintahan desa berjalan dengan baik.

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 ada perubahan pada sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan

Indikator : Indeks kepuasan masyarakat pelayanan public di Kecamatan.

b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

Indikator : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

c. Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator : Persentase desa tertib administrasi desa

Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Kecamatan Loceret (Renstra 2025 – 2029)

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target Akhir Periode Restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Th.Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2025	2029			2025	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	98,95	85	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	103,23	84	85	86	87	88	88
					Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	600%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
					Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase desa tertib administrasi desa	80,95 %	95,45 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Loceret merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk 2025-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Loceret 2025-2029 dengan mengambil target tahun 2025.

2.B PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Loceret 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 terdapat dua periode yaitu per Januari sd September 2025 dan Periode Per Oktober sd Desember 2025 karena adanya dua Renstra yairu Rentra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029. Dengan keterangan sebagai berikut:

Perjanjian Kerja Periode Januari sd September 2025 terdiri dari tujuan dan dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

   Indikator : Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Nilai)

   Penilaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas antara lain Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum,Pelaksanaan tugas atributif, pelaksanaan tugas delegative, tata kelola kecamatan, inovasi dan tugas lainnya dalam rangka

penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dengan formulasi penilaian bersumber dari nilai IKM yang merupakan hasil dari penilaian Aplikasi SINCAN yang disertakan dokumen pendukung sesuai indikator penilaian.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)

   Meningkatnya kualitas pelayanan PATEN ditandai dengan perubahan kea rah yang lebih efektif, efisien, cepat dan transparan. PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima. Dengan formulasi peilaian bersumber dari aplikasi e sukma jatim

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan

   Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan (%)

   Sasaran ini dengan indikator kinerja persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, merujuk pada segala bentuk ganngguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat baik yang bersifat fisik, social maupun emosional. Biasanya gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga. Dengan formulasi penilaian jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang terlapor tahun sebelumnya dikurangi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang terlapor tahun ini dibagi Tahun sebelumnya dikali 100%.

Untuk mencapai mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran pada DPA 2025 sebesar Rp.3.676.087.504,- .Akumulasi Alokasi Anggaran yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Camat Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. *(Terlampir)*

Perjanjian Kinerja Kecamatan Loceret 2025
(*Periode Januari sd September 2025*)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	83
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	83,20
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	100%

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.809.794.454	APBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	128.950.000	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	135.505.000	APBD 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	66.425.000	APBD 2025
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	339.852.250	APBD 2025
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	195.560.800	APBD 2025

Perjanjian Kerja Periode Oktober sd Desember 2025 terdiri dari tujuan dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

   Indikator : Nilai Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Nilai)

   Penilaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas antara lain Penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum,Pelaksanaan tugas atributif, pelaksanaan tugas delegative, tata kelola kecamatan, inovasi dan tugas lainnya dalam rangka penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Dengan formulasi penilaian bersumber dari nilai IKM yang merupakan hasil dari penilaian Aplikasi SINCAN yang disertakan dokumen pendukung sesuai indikator penilaian.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

   Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)

   Peningkatan Kualitas pelayanan dengan penggunaan aplikasi terintegrasi untuk kepengurusan administrasi missal KTP, KK didukung juga oleh kompetensi SDM yang memiliki etos kerja melayani, sarana prasarana juga transparansi digunakan standar operasional pelayanan yang baik agar masyarakat lebih mendapatkan kemudahan pelayanan.

   Penilaian sasaran ini diambi hari hasil penilaian IKM yang keluar pada setiap triwulan dari Aplikasi E Sukma Jatim.

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan

   Indikator : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum(%)

   Sasaran ini dengan indikator kinerja persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, merujuk pada segala bentuk ganngguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat baik yang bersifat fisik, social maupun emosional. Biasanya gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan atau perilaku yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga. Dengan formulasi penilaian jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang terlapor tahun sebelumnya dikurangi jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban yang terlapor tahun ini dibagi Tahun sebelumnya dikali 100%.

4. Meningkatnya tertib administrasi desa.

   Indikator : Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

   Sasaran ini dengan indikator kinerja persentase desa tertib administrasi desa adalah dimana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administrasinya secara rapi, terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Dalam konteks ini desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan dan pengelolaan data dilakukan dengan system yang jelas dan terorganisir dengan baik. Dengan formulasi penilaian jumlah desa yang melaksanakan tertib administrasi desa dibagi jumlah total desa dikali 100% dengan sumber data epdeskel dan laporan hasil monitoring desa oleh seksi Binwas.

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.3.246.949.040,-.Akumulasi Alokasi Anggaran yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Camat Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. *(Terlampir)*

Perjanjian Kinerja Kecamatan Loceret 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	82
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	84
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	10%
4	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	95,45 %

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.877.805.240	PAPBD 2025
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	39.650.000	PAPBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat	72.375.000	PAPBD

	Desa Dan Kelurahan		2025
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	42.525.000	PAPBD 2025
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	134.275.000	PAPBD 2025
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.318.800	PAPBD 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Loceret merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Loceret untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Loceret Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Loceret Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Loceret menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata

atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Interval Nilai Capaian

NO	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

3.A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)

Tabel 3.1.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2025
(Renstra 2024-2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Rentra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2024-2026	83	58,79*	70,83
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi		83,20	86,6**	104,08
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		100 %	60 %	60
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	82	81,14	98,95
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di		84	86,72	103,23

	Kecamatan	Kecamatan (Nilai)				
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)		10 %	60 %	600
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		95,45 %	77,27	80,95

Catatan: * menggunakan nilai sinergitas Tahun 2024

** menggunakan capaian IKM TW III Tahun 2025

Analisa atas capaian indikator-indikator tujuan dan sasaran sesuai dengan acuan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- ***Nilai Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

  Nilai sinergitas penyelenggraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 belum tercapai dengan catatan realisasi nilai yang didapat sesuai Renstra 2024-2026 adalah 58,79. Karena belum rilis nilai 2025 sehingga menggunakan nilai sinergitas 2024.

  Pada penilaian sinergitas sesuai Renstra 2025-2029 sudah tercapai, realisasi bisa dilihat pada triwulan IV nilai sebesar 81,14 dengan capaian 98,95% dari target nilai 82

- ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2026 masih menggunakan penilaian realisasi untuk akhir triwulan ketiga dengan nilai realisasi 86,6 dari nilai target 83,20 dengan nilai capaian sebesar 104,08%

  Pada Renstra 2025-2029 memiliki capaian sebesar 103,23% dari realisasi 86,72 dan terget nilai yang ditetapkan sebesar 84. Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan, serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang

merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Sedangkan kebijakannya yakni menerima masukan maupun saran dari masyarakat yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran.

- **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)**

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang ditindak lanjuti tahun 2025 belum tercapai, realisasi 60% dari target yang ditetapkan 100% dengan prosentase capaiannya sebesar 60%.

Capaian indikator sasaran sesuai dengan Renstra 2024-2026 kita masih menggunakan realisasi penilaian capaian dari Laporan Tahun 2024, yaitu dengan realisasi 60% dari target 100%

Sedangkan capaian indikator sasaran sesuai dengan Renstra 2025-2029 tercapai dengan nilai over dmana target pada tahun 2025 ini ditetapkan hanya sebesar 10% pada IKU Renstra 2025-2029. Dengan formula perhitungan yang sama.

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondusifitas lingkungan. Jika Aparat aktif dan Masyarakat partisipatif, didukung oleh Sistem aturan yang jelas, maka kondusivitas akan tercapai secara otomatis. Situasi politik dan keadaan ekonomi juga berperan besar. Dimana semakin stabil politik dan ekonomi akan meminimalisir terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Semua hal diatas bersifat global dan bersifat cepat. isu masyarakat yang berkembang berada diluar jangkauan kecamatan, sehingga penentuan target tidak selalu bisa tepat tergantung hal diatas.

Maka dengan pertimbangan hal tersebut, kita tetapkan nilai target 10% karena tidak mudah dipastikan dan kemungkinan sulit

untuk mendapatkannyaTarget Perencanaan sudah ditetapkan dalam Renstra sebesar 10% menjadikan nilai capaian diluar toleransi aturan penilaian. Target 10 % ditetapkan kecil karena mempertimbangkan formula dan variabel yang disepakati dan digunakan dalam dasar penilaian berkemungkinan sulit untuk diperoleh. Karena berdampak juga pada capaian kinerja selanjutnya maka dirasa target 10% adalah layak untuk ditetapkan. Dan hasilnya ternyata berdampak pada capaian yang terlalu over pada angka yg dimasukkan pada rumus formula yang ditetapkam. Kedepan akan kita kaji ulang lagi dalam menentukan persentase nilai target dan indikator pada sasaran trantibum dalam Renstra.

Sedangkan capaian Koordinasi dan kerjasama yang baik antara pengampu kegiatan mulai dari Kecamatan, Desa serta TNI dan Polisi (BABINSA/ BABINKAMTIBMAS) dalam memberikan informasi dan penanganan dalam tiap laporan kasus yang terjadi pada Kecamatan Loceret adalah faktor pendukung capaian.

- **Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)**

Persentase Desa tertib administrasi Desa di Kecamatan Loceret belum tercapai.Realisasi pada tahun ini sebesar 77,27% dari terget 95,45% dengan capaian 80,95%. Dimana data tertib administrasi desa diperoleh dari data penilaian hasil monitoring seksi Binwas dalam melakukan pendampingan terkait tertib administrasi desa dari 22 Desa. Dari 22 desa yang dimonitoring ada lima desa yang masih dalam kategori kurang tertib administrasi. Sehingga kedepan perlu dilakukan pendampingan secara berkala dan rutin agar bisa menjadi desa dengan tertib administrasi baik.

Sasaran IKU meningkatnya tertib administrasi desa baru ada pada Renstra 2025-2029 belum ada pada sasaran Renstra 2024-2026.

3.A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Tahun 2024 dan 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	Baik	81	82	83	Baik	79,10	58,80	58,79
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		Baik	82	83	83,20	Baik	89,28	84	86,6
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Baik	100%	100%	100%	Baik	100%	60%	60 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	Baik	81	82	82	Baik	79,10	58,80	81,14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		Baik	82	83	84	Baik	89,28	84	86,72
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		Baik	100%	100%	10%	Baik	100%	60%	60 %

4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		-	-	-	95,45%	-	-	-	77,27 %

Analisa atas capaian indikator-indikator tujuan dan sasaran sesuai Renstra 2024- 2026 dan Renstra 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

- ***Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan***

Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintahan di Kecamatan Loceret selama 4 tahun dari 2022 sampai dengan 2025 mengalami naik turun di tahun 2022 kita tidak dapat menjelaskan dengan menggunakan ukuran nilai karena data sebelumnya hanya ada penjelasan baik tidak ada nilai dalam angka. Dan di tahun 2023 mendapat 79,10 dibawah nilai target yaitu 81, masuk dalam kategori interval nilai tidak tercapai Dikarenakan masih belum adanya sinergitas yang baik dalam intern perangkat daerah. Belum adanya pimpinan definitive dan seringnya pergantian pimpinan memgang factor penting. Pemahaman dan relevannya antara laporan dan bukti dukung pada capaian kinerja belum dapat dilakukan secara maksimal oleh para pengampu kegiatan.

Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintah di kecamatan pada tahun 2024 masih belum tercapai dan mengalami penurunan dari target 82 hanya dicapai nilai realisasi sebesar 58,80. Adanya penurunan dari nilai baik pada realisasi tahun 2023 menjadi kategori Cukup. Adanya perpindahan mutasi jabatan mempengaruhi capaian penilaian dikarenakan pengampu kegiatan yang baru kesuliitan mendapatkan arsip2 laporan dan data dukung disamping pemahaman terkait laporan oleh pengampu kegiatan masih belum dikuasai oleh pengampu kegiatan baru.

Di tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2029 belum tercapai dengan realisasi nilai sinergitas 58,79 dengan nilai capaian 70,83 dari target 83. Dan sesuai dengan Renstra 2025-2029 karena penilaian telah dilakukan sampai dengan Tribulan IV maka rilis

penilaian sinergitas sudah keluar untuk dasar penilaian indikator sinergitas di tahun 2025. Realisasi nilai sinergitas 81,14 dengan nilai capaian 98,95 dari target 82 bisa dinyatakan tercapai.

- ***Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 4 tahun berjalan yaitu tahun 2022 sampai dengan 2025 selalu tercapai dan diatas target yang telah ditentukan baik pada Renstra 2024-2026 maupun Renstra 2025-2029. Pelayanan pada masyarakat dilakukan dengan baik meskipun dalam pengisian survey kepuasan masyarakat hanya mendapat koresponden sedikit yang bersedia memberikan nilai survey kepuasa.Layanan Aduan pada media social selalu direspon dengan baik. Supaya dimasukkan rencana tahun depan agar responden IKM bertambah dengan diuraikan strategi untuk menambah jumlah responden IKM.

Realisasi IKM sesuai Renstra 2024-2026 kita gunakan realisasi sampai dengan penilaian realisasi triwulan III sebesar 86,6, dikarenakan akhir berlaku Rentra 2024-2026 sampai dengan bulan September 2025.Dan per bulan oktober 2025 sudah berlaku penyesuaian Rentra 2025-2029 maka sesuai renstra terbaru kami sudah mencantumkan realisasi nilai sampai dengan akhir triwulan keempat yaitu sebesar 86,72.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan***

Persentase penurunan pelanggaran ketrentraman dan ketertiban umum di tahun 2023 tercapai 100 tapi ditahun 2024 dan 2025 tercapai 60 % dari target sebesar 100 %. Realisasi sebesar 60%. Kasus pelanggaran trantibum yang terlapor dari tahun 2023 sebanyak 25 kasus menurun di tahun 2024 sebanyak 10 kasus dan di tahun 2025 sebanyak 4 kasus yang terlapor.Data diperoleh dari koordinasi dengan pihak Polsek Loceret dengan pengampu kegiatan terkait trantibum.

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2025 sesuai target Renstra 2024-2026

masih kita cantumkan nilai realisasi di tahun 2024 yaitu sebesar 60% dengan pertimbangan nilai realisasi di akhir berlakunya Rentra lama masih hanya sampai pada akhiir triwulan III. tapi jika disesuaikan dengan target pada Renstra 2025-2029 tercapai dengan nilai yang over melampaui batas kewajaran.

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondusifitas lingkungan. Jika Aparat aktif dan Masyarakat partisipatif, didukung oleh Sistem aturan yang jelas, maka kondusivitas akan tercapai secara otomatis. Situasi politik dan keadaan ekonomi juga berperan besar. Dimana semakin stabil politik dan ekonomi akan meminimalisir terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Semua hal diatas bersifat global dan bersifat cepat. isu masyarakat yang berkembang berada diluar jangkauan kecamatan, sehingga penentuan target tidak selalu bisa tepat tergantung hal diatas.

Maka dengan pertimbangan hal tersebut, kita tetapkan nilai target 10% karena tidak mudah dipastikan dan kemungkinan sulit untuk mendapatkannya. Kedepan akan kita kaji ulang lagi dalam menentukan persentase nilai target dan indikator pada sasaran trantibum dalam Renstra.

- **Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)**

Persentase Desa tertib administrasi Desa di Kecamatan Loceret belum tercapai. Realisasi pada tahun ini sebesar 77,27% dari terget 95,45% dengan capaian 80,95%. Dimana data diperoleh dari hasil monitoring seksi Binwas terkait kelengkapan tertib administrasi desa selain persyaratan dalam kelengkapan penilaian epdeskel. Dari jumlah Desa keseluruhan sebanyak 22 Desa, ada lima desa yang masih pada kategori kurang tertib administrasi. Sasaran IKU meningkatnya tertib administrasi desa baru ada pada Renstra 2025-2029 belum ada pada sasaran Renstra 2024-2026.

3.A.3 Target Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Renstra					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	82	83	84	-	-	-
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		83	83,20	84	-	-	-
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		100%	100%	100%	-	-	-
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	-	82	83	84	85	85
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		-	84	85	86	87	88
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		-	10%	10%	10%	10%	10%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		-	95,45 %	100%	100%	100%	100%

Target kinerja Renstra ada perbedaan antara Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029. Target IKU pada sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban uumum di Kecamatan dari target 100% pada Renstra lama diubah menjadi 10% pada Renstra baru. Dan ada tambahan sasaran baru terkait tertib administrasi desa yang semula pada Renstra lama belum ada yaitu sebesar 95,45% pada tahun awal renstra di tahun 2025 dan 100% untuk target tahun 2026 sampai dengan 2029. Untuk nilai target sasaran nilai sinergitas dan kualitas pelayanan publik tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetap berkisar dari nilai 82 sampai 88 untuk lima tahun kedepan.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target Tahun Akhir Renstra Rentra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Realisasi Kinerja Tahun (2025)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Renstra 2024-2026	84	58,79	69,98
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan		84	86,6	103.09
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		100%	60 %	60
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	85	81,14	95,45

2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		88	86,72	98,54
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		10%	60 %	600
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		100%	77,27%	77,27

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

Perbandingan Realisasi Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan terhadap target akhir Renstra masih berada dibawah target yang ditentukan yaitu sebesar 58,79 sesuai Renstra 2024-2026 dan 81,14 sesuai Renstra 2025-2029 dimana target pada akhir tahun Renstra lama 84 sedangkan target pada akhir tahun renstra baru 85. Sesuai renstra lama persentase kemajuan sebesar 69,98% sedangkan sesuai renstra baru kemajuannya sebesar 95,45%

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi dengan nilai 86,6 berdasarkan Renstra 2024-2026 terealisasi dengan persentase kemajuan 103,09% dari target tahun akhir Renstra 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 84. Sedangan berdasarkan Renstra baru 2025-2029 realisasi nilai 86,72 dengan persentase kemajuan sebesar 98,54% dari target nilai akhir renstra 88.

Capaian indikator sasaran diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan (melalui Lapor SP4N, media sosial dan secara langsung) serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Supaya dimasukkan rencana tahun depan agar responden IKM bertambah dengan diuraikan strategi untuk menambah jumlah responden IKM.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan***

  Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2025 sesuai target Renstra 2024-2026 dengan kemajuan 60% dengan niai realisasi 60% dari persentase target 100%, tapi jika disesuaikan dengan target pada Renstra 2025-2029 kemajuannya mencapai 6 kali lipat yaitu 600% dengan persentase realisasi 60 % dari target akhir renstra 10%.

  Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondusifitas lingkungan. Jika Aparat aktif dan Masyarakat partisipatif, didukung oleh Sistem aturan yang jelas, maka kondusivitas akan tercapai secara otomatis. Situasi politik dan keadaan ekonomi juga berperan besar. Dimana semakin stabil politik dan ekonomi akan meminimalisir terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Semua hal diatas bersifat global dan bersifat cepat. isu masyarakat yang berkembang berada diluar jangkauan kecamatan, sehingga penentuan target tidak selalu bisa tepat tergantung hal diatas.

  Maka dengan pertimbangan hal tersebut, kita tetapkan nilai target 10% karena tidak mudah dipastikan dan kemungkinan sulit untuk mendapatkannya. Kedepan akan kita kaji ulang lagi dalam menentukan persentase nilai target dan indikator pada sasaran trantibum dalam Renstra.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan Renstra 2024-2026 tidak menjadi sasaran perangkat daerah sehingga tidak disajikan dalam laporan ini.

Berdasarkan Renstra 2025-2029 dengan kemajuan 77,27% dari persentase realisasi 77,27% dari target akhir renstra 100%.

3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2025) dengan Standard Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Standar Nasional	Realisasi Kinerja Tahun (2025)
1	**2**	**3**		4	5
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Tugas - Tugas Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Rentra 2024-2026	Tidak ada data pembanding	58,79
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan		89,41	86,6
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		Tidak ada data pembanding	60 %
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	Tidak ada data pembanding	81,14
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		89,41	86,72
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		Tidak ada data pembanding	600%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		Tidak ada data pembanding	77,27%

Analisa Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Provinsi/ Kabupaten yang berbatasan) hanya Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan yang bisa kami Analisa. Nilai Realisasi Perangkat Daerah Kecamatan Loceret 86,72 masih berada dibawah nilai Provinsi 89,41 masih belum tercapai dengan baik. Untuk Indikator Kinerja yang kosong seperti Sinergitas, Trantibum dan Tertib Administrasi Desa Kecamatan Tingkat Nasional/ Provinsi tidak bisa kami sampaikan karena tidak ada data pembanding.

3 .A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Faktor Pendukung atau Hambatan	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	83	58,79	70,83	Pemanfaatan Teknologi dan SDM yang mumpuni Factor pendukung peningkatan sinergitas Hambatan adalah kerjasama atau kekompakan Tim Sinergitas yang Kurang	Kerjasama tim yang baik akan meningkatkan sinergitas kecamatan.
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi		83,20	86,6	104,08	Jaringan system yang Lemah	Sistem pengaduan yang Responsif ditingkatkan dan Digitaisasi

	(PATEN)	Terpadu Kecamatan (PATEN)						Layanan dilakukan dengan baik.
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		100 %	60 %	60	Kolaboras yang baiki pengampu kegiatan dengan pihak TNI POLR, Satpol PP dan Dishub (terjalin harmonis)	Meningkatkan sinergi antar sektor/ kerjasama yang solid anatara pol pp, TNI,Pllri dan Dishub guna tercipta lingkungan yang tertib dan aman.
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	82	81,14	98,95	Pemanfaatan Teknologi dan SDM yang mumpuni Factor pendukung peningkatan sinergitas Hambatan adalah kerjasama atau kekompakan Tim Sinergitas yang Kurang	Kerjasama tim yang baik akan meningkatkan sinergitas kecamatan.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		84	86,72	103,23	Jaringan system yang Lemah	Sistem pengaduan yang Responsif ditingkatkan dan Digitaisasi Layanan dilakukan dengan baik.
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		10 %	60 %	600	Kolaboras yang baiki pengampu kegiatan dengan pihak TNI POLR, Satpol PP dan Dishub (terjalin harmonis)	Meningkatkan sinergi antar sektor/ kerjasama yang solid anatara pol pp, TNI,Pllri dan Dishub guna tercipta lingkungan

								yang tertib dan aman.
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		95,45 %	77,27 %	80,95	Tidak adanya SOP yang jelas terkait tata kelola pemerintahan desa Kemampuan SDM pada Pemerintahan di Desa dalam pengoperasian aplikasi	Dilakukan pendampinga n rutin oleh pengampu kegiatan dalam memberikan arahan terkait administrasi tata kelola aturan dan keuangan desa.

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

  Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2025 belum tercapai, nilai capaian sebesar 70,83% dibawah nilai target 83 dengan nilai realisasi sebesar 58,79 sesuai Renstra 2024-2026. Sedangkan sesuai Renstra 2025-2029 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tercapai dengan nilai capaian sebesar 98,95% lebih tinggi dari capaian renstra lama dikarenakan nilai target pada Renstra baru adalah 82. Masih dalam kategori tercapai. Pemanfaat SDM dan kecanggihan system digitalisasi memegang peranan penting dalam keberhasilan capaian nilai sinergitas namun kerjasama dan kekompakan tim yang dinilai masih kurang solid merupakan salah satu factor penghambat keberhasilan capaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 tercapai dari target nilai yang ditetapkan 83,20 dengan prosentase capaiannya sebesar 104,08% dengan realisasi 86,6 pada triwulan III karena Renstra lama berakhir di Triwulan III.Sedangkan sesuai renstra baru 2025-2029 tercapai dengan realisasi 86,72 dari target 84 dan nilai capaian

sebesar 103,23% Dengan melakukan pelayanan menggunakan sistem pengaduan yang responsif dan memanfaatkan system digitaisasi, layanan dilakukan dengan baik. Capaian indikator sasaran diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang ditanggapi dan diselesaikan (melalui Lapor SP4N, media sosial dan secara langsung) serta menyediakan pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi SUKMA-e (Survei Kepuasan Masyarakat – elektronik) yang merupakan aplikasi untuk bisa mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara tepat dan cepat oleh seluruh penyedia pelayanan publik. Meskipun system jaringan yang sering trouble dan lemah masih sering terjadi dalam melakukan pelayanan pada masyarakat.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan***

  Meningkatkan sinergi antar sektor/ kerjasama yang solid anatara Satpol PP, TNI,POLRI dan Dishub guna tercipta lingkungan yang tertib dan aman adalah solusi yang kita laksanakan, kolaborasi kerja para pengampu kegiatan berperan aktif dalam tercapainya persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2025.

  Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan sangat dipengaruhi oleh kondusifitas lingkungan. Jika Aparat aktif dan Masyarakat partisipatif, didukung oleh Sistem aturan yang jelas, maka kondusivitas akan tercapai secara otomatis. Situasi politik dan keadaan ekonomi juga berperan besar. Dimana semakin stabil politik dan ekonomi akan meminimalisir terjadi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Semua hal diatas bersifat global dan bersifat cepat. isu masyarakat yang berkembang berada diluar jangkauan kecamatan, sehingga penentuan target tidak selalu bisa tepat tergantung hal diatas.

Maka dengan pertimbangan hal tersebut, kita tetapkan nilai target 10% karena tidak mudah dipastikan dan kemungkinan sulit untuk mendapatkannya. Kedepan akan kita kaji ulang lagi dalam menentukan persentase nilai target dan indikator pada sasaran trantibum dalam Renstra.

Sesuai target Renstra 2024-2026 persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tahun 2025 tidak tercapai, niai capaian yang diperoleh 60% dari target pada IKU sebesar 100%, sedangkan sesuai Renstra baru bisa dikatakan tercapai atau berhasil dilakukan penurunan gangguan trantibum pada wilayah Kecamatan Loceret dibuktikan dengan menurunnya angka kasus yang terlapor pada Polsek Loceret dari semula 10 Kasus terlapor di tahun 2024 sekaranag menjadi 4 kasus yang terlapor. Namun capaian dalam angka dan rumus menghasilkan nilai capaian yang over atau tidak wajar karena penentuan target yang dinilai angka terlalu kecil yaitu 10%. dengan capaian 6 kali lipat atau 600%. Untuk koreksi penentuan target angka dalam Renstra kedepan akan kita kaji ulang kembali baik nilai dan indikatornya.

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

Persentase Desa Tertib Administrasi Desa berdasarkan Renstra 2024-2026 tidak menjadi sasaran perangkat daerah sehingga tidak disajikan dalam laporan ini.

Berdasarkan Renstra 2025-2029, capaian indikator sasaran belum trcapai yaitu 80,95% dari nilai target sejumlah 95,45%.

Masih ada lima desa yang kurang tertib administrasi dari 22 desa dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi seksi Binwas.selain penilaian yang berada pada aplikasi epdeskel.

Salah satu upaya agar tercapai hal tersebut diatas dilakukan pendampingan rutin oleh pengampu kegiatan dalam memberikan arahan terkait administrasi tata kelola aturan dan keuangan desa. Meskipun masih adanya hambatan keterbatasan SDM Tercapainya persentase desa tertib administrasi desa

3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dayaz

Tabel 3.1.6
Analisis Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	70,83	87,01	12,99
2	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		104,08	87,83	12,17
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan		60	72,75	27,25
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	98,95	87,01	12,99
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan (Nilai)		103,23	87,56	12,44
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		600	72,75	27,25
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)		80,95	97,82	2,18

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- ***Sinergitas penyelengaraan Pemerintahan Kecamatan***

  Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian dan realisasi indikator nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan tahun 2025 sesuai renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 sama yaitu sebesar 12,99% dari realisasi anggaran 87,01% dengan nilai capaian 97,75% untuk renstra lama dengan capaian 98,95%

- ***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan***

  Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian dan realisasi pada indikator nilai indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan tahun 2025 sesuai Renstra 2024-2026 sebesar 12,17% dari realisasi 87,83%.Sedangkan sesuai Renstra 2025-2029 ada sedikit perbedaan tingkat efisiensi dikarenakan pada renstra terbaru muncul IKU program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa di sasaran strategis meningkatnya tertib administrasi desa, sehingga anggaran pada program tersebut tidak lagi masuk dalam penghitungan pada sasaran pelayanan publik.Pada renstra 2024-2026 tertib administrasi desa masik masuk dalam sasaran pelayanan publik, maka berpengaruh pada perhitungan dalam realisasi anggarannya.menjadi lebih kecil 87,56% dengan tingkat efisiensi sebesar 12,44%.

- ***Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan***

  Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian dan realisasi pada indikator persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan tahun 2025 sesuai Renstra 2024-2026 dan renstra 2025-2029 sama yaitu sebesar 27,25% dengan realisasi anggaran sebesar 72,75%

- ***Persentase Desa Tertib Administrasi Desa***

  Tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian dan realisasi pada indikator persentase desa tertib administrasi desa berdasarkan

Renstra 2025-2029 sebesar 2,18% dari realisasi anggaran sebesar 97,82%. Sedangkan pada Renstra 2024-2026 belum terdapat sasaran dan indikator tersebut.

3.A.7 Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan,Kegagalan pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.7
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan,Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	**83,20**	**86,6**	**104,08**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**7**	**7**	**100**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD	2	2	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**41**	**41**	**100**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan	15	15	100

					Tunjangan ASN			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	100
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**12**	**100**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	4	4	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	12	100
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	2	2	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	4	4	100
				Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	4	4	100

				Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi Dan Konsultasi SKPD			
				Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0	0	0
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan**	**25**	**25**	**100**
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	20	100
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	5	5	100
		.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24**	**24**	**100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	12	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara**	**43**	**43**	**100**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	100
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20	20	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	20	20	100

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib**	**100%**	100%	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**3**	**3**	**100**
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	3	3	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan**	**11**	**11**	**100**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	11	100
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan	3	3	100

				yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan			
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketetiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarpras, pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**	100	100	100
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**12**	**12**	**100**
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	**12**	12	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	100	100	100
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	**11**	**11**	**100**
				Pembinaan Wawasan	Jumlah Orang Yang Mengikuti	**120**	120	100

				Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang**	95,45 %	77,72 %	81,42 %
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	22	17	77,72 %
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	100
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	1	100
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3	3	100
				Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Fasilitasi	2	2	100

				Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	**84**	**86,72**	**103,23**
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**7**	**7**	**100**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD	2	2	100
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**37**	**29**	**100**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	17	28	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	100

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**3**	**0**	**0**
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	0	0
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**12**	**12**	**100**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	12	4	100
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	12	12	100
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	12	2	100
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	4	4	100
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	4	4	100
				Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	1	0	0
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan**	**25**	**25**	**100**
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	20	20	100
				Pengadaan Peralatan dan	Jumlah Unit Peralatan Dan	5	5	100

				Mesin Lainnya	Mesin Lainnya Yang Disediakan			
		.		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**24**	**100**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12	12	100
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara**	**51**	**43**	**100**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	2	100
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20	20	100
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara	20	20	100
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)**	100%	100%	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat**	3	3	100

					Kecamatan			
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	3	3	100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan**	11	11	100
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	2	100
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan	6	6	100
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)		**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggara	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan**	12	12	100

				an Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**			
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan	12	12	100
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**	100%	100%	100%
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120	120	100
3	Meningkatn	Persentase		**PROGRAM**	**Persentase Desa**	95,45	77,72	81,42

	ya Tertib Administrasi Desa	Desa Tertib Administrasi Desa (%)		**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)**	%	%	%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	22	17	77,72
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4	4	100
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	1	100
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3	3	100
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2	2	100

3.B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun (2025)

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Angaran	Realisasi Angaran	Sisa Angaran	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.877.805.240**	**2.519.7 12.874**	**358.092.366**	**87,56%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**33.890.000**	**30.867.000**	**3.023.000**	**91,08%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.250.000	8.427.000	1.823.000	82,21%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.640.000	22.440.000	1.200.000	94,92%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.335.381.000**	**2.050.357.786**	**285.023.214**	**87,80%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.331.181.000	2.047.981.386	283.199.614	87,85%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000	2.376.400	24.000	99,02%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	0	1.800.000	0%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**116.473.450**	**115.274.514**	**1.198.936**	**98,97%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.900.700	9.900.700	0	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.170.750	48.405.050	765.700	98,44%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.270.000	7.270.000	0	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	0	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.132.000	43.698.964	433.036	99,02%
	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	0	0	0	0

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**104.318.900**	**91.399.717**	**12.919.183**	**87,62%**
	Pengadaan Mebel	66.034.450	55.803.567	10.230.883	84,51%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.284.450	35.596.150	2.688.300	92,98%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**159.621.640**	**131.009.357**	**28.612.283**	**81,97%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.621.640	104.331.704	12.289.936	89,46%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	26.677.653	16.522.347	61,75%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**127.920.250**	**100.804.500**	**27.115.750**	**78,80%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	52.710.250	52.201.500	508.750	99,03%
	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	3.983.000	17.000	99,58%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.650.000	15.550.000	100.000	99,36%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.560.000	29.070.000	26.490.000	52,32%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**39.650.000**	**33.800.000**	**5.850.000**	**85,25%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**39.650.000**	**33.800.000**	**5.850.000**	**85,25%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.650.000	33.800.000	5.850.000	85,25%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**72.375.000**	**64.590.000**	**7.785.000**	**89,24%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**72.375.000**	**64.590.000**	**7.785.000**	**89,24%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.600.000	13.260.000	4.340.000	75,34%
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	54.775.000	51.330.000	3.445.000	93,71%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	**42.525.000**	**27.455.000**	**15.070.000**	**64,58%**

	KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
	Koordinasi Up aya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**42.525.000**	**27.455.000**	**15.070.000**	**64,58%**
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	42.525.000	27.455.000	15.070.000	64,58%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**134.275.000**	**101.184.000**	**33.091.000**	**75,36%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**134.275.000**	**101.184.000**	**33.091.000**	**75,36%**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	134.275.000	101.184.000	33.091.000	75,36%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**80.318.800**	**107.248.650**	**2.851.350**	97,82%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**80.318.800**	**78.568.800**	**1.750.000**	97,82%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24.703.800	24.393.800	310.000	98,75%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.475.000	9.230.000	245.000	97,41%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.590.000	26.067.500	522.500	98,03%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.550.000	18.877.500	672.500	96,55%
	JUMLAH	**3.246.949.040**	**2.825.310.674**	**421.638.366**	**87,01%**

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 sebanyak 6 program dijabarkan dalam 12 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Realisasi belanja sebesar Rp2.825.310.674,- atau sebesar 87,01% dari pagu anggaran yaitu Rp3.246.949.040,- dari yang direncanakan.

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2025 belum semua memenuhi target kinerja yang diharapkan. Adapun faktor penyebab belum tercapainya target kinerja antara lain :

- Belum maksimalnya potensi sumber daya yang ada ;
- Kurangnya koordinasi yang intensif dalam proses penyelenggaraan program ;
- Kurang cermat dalam penyusunan kegiatan (waktu, anggaran dan komponen kegiatan.
- Target Renstra pada Sasaran Trantibum terlalu kecil menjadikan nilai capaian terlalu besar.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Loceret merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Loceret dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Loceret Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Loceret Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Loceret pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Loceret Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran startegis yang telah ditargetkan, adapun tujuan dan sasaran strategis yang sudah dicapai sebagai berikut :

Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Loceret 2024-2026

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan ketertiban
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Sesuai Rencana Strategis Kecamatan Loceret 2025-2029

1. Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi desa

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Loceret dapat meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. melakukan re-orientasi terhadap program/ kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
b. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
c. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Loceret secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
d. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Loceret Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Loceret, 5 Februari 2026

CAMAT LOCERET

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP.196908071990031010

LAMPIRAN – LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja tahun (n)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loceret
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LOCERET
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi padahasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIRNO, S.Sos

Jabatan : Camat Loceret

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNO, SSTP. M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerjadari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 02 Januari 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Pj. Bupati Nganjuk	Camat Loceret
SRI HANDOKO TARUNO, SSTP. M.Si	SUKIRNO, S.Sos
	Pembina
	NIP. 19690807 199003 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LOCERET

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya nilai sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Nilai penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	83
2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	83,20
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan	100

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.555.107.132	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	256.100.000	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	389.555.000	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.575.000	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	369.052.250	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa	340.214.000	APBD

Nganjuk, 02 Januari 2025

Pihak Kedua
Pj. Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNO, SSTP. M.Si

Pihak Pertama
Camat Loceret

SUKIRNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19690807 199003 1 010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUKIRNO,S.Sos**

Jabatan : **CAMAT LOCERET**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.

Pihak Pertama,
CAMAT LOCERET

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP. 196908071990031010

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN LOCERET

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	82
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	84
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	95,4~5

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.877.805.240	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.650.000	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	72.375.000	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42.525.000	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	134.275.000	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.318.800	PAPBD
		3.246.949.040	

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua,
BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.

Pihak Pertama,
CAMAT LOCERET

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP. 196908071990031010

Dipindai dengan CamScanner

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LOCERET
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama
(IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
Jalan Raya Kediri Nomor 171 Kode Pos 64471
Telepon (0358) 322264 e-mail : kecamatanloceret64471@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/015/K/411.508/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN LOCERET

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loceret.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentag Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaien Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

1L Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPKPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Keija SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);

13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Keija Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI NGAJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN LOCERET
PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loceret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Loceret untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana keija dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 25 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK
CAMAT LOCERET

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET

SUKIRNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19690807 199003 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024- 2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	a. Konsep : Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur sejauh mana Tingkat sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan. b. Definisi Operasional : Definisi Operasional menjelaskan secara rinci tentang variable atau elemen yang diukur. Misalnya, dapat mencakup indikator-indikator seperti rapat koordinasi yang diadakan, program bersama antarinstansi, atau pertukaran informasi secara teratur. c. Formulasi Perhitungan : Perhitungan nilai dapat melibatkan kombinasi berbagai indikator yang mencerminkan sinergitas, yakni hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. d. Manfaat : Nilai ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana koordinasi dan sinergitas antarinstansi di kecamatan, yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program pemerintah setempat	Laporan Capaian atau Hasil Penilaian Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	CAMAT LOCERET

			e. Cara Pengumpulan Data : Data dapat dikumpulan melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan pejanbat pemerintahan, analisis dokumen kebijakan, atau pengamatan langsung terhadap kegiatan koordinasi antarinstansi. f. Frekuensi Waktu Pengumpulan Data : Data dikumpulkan secara berkala, untuk memantau perkembangan dan efektivitas Upaya peningkatan sinergitas		

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 25 November 2023

AN. BUPATI NGANJUK
CAMAT LOCERET

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET

SUKIRNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19690807 199003 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
Jalan Raya Kediri Nomor 171 Loceret Kode Pos 64471
Telepon/Fax (0358) 322264 email : kecamatanloceret64471@gmail.com
www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/07/K/411.508/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LOCERET BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loceret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN LOCERET

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Loceret dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Loceret sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Loceret untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT LOCERET

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN LOCERET

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP. 196908071990031010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/07/K/411.508/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN LOCERET

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029
KECAMATAN LOCERET

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Loceret
				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu		

				Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kec. Loceret melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Loceret
				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
3	Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Loceret

				mengganggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.		
				Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.		
				Formulasi : Perbandingan dari jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 %		
4	Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	%	Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil penilaian EPDESKEL dan Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Loceret
				Definisi Operasional : Desa Tertib Administrasi apabila memenuhi syarat"/kriteria sebagai Berikut : 1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa a. Administrasi Umum A b. Administrasi Umum B c.Administrasi Keuangan d Aministrasi Pembangunan e Administrasi Kesejahteraan f. Administrasi Pelayanan		

				2. Administrasi BPD 3.Administrasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 4 Buku Data Profil Desa 5. Peta/Monografi Desa 6 Perpustakaan Desa 7. BUMDes 8. Administrasi LPMD 9 Produk Hukum Desa.		
				Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%		

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN LOCERET

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	58,8	82	83	84	85	85	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	83,98	84	85	86	87	88	
3	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	60	10	10	10	10	10	
4	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	95,45	95,45	100	100	100	100	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT LOCERET

SUKIRNO,S.Sos
Pembina
NIP. 196908071990031010

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LOCERET
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Ikhtisar DPA

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAPORAN IKHTISAR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan dan Persendiaan

Unit Organisasi : Kecamatan Loceret

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***								
7.01.01.2.01	* Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.250.000	8.427.000	1.823.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen LKJIP, LKPJ, SAKIP, RENSTRA, RENJA AWAL Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 tepat waktu Hasil : Tersusunnya Dokumen LKJIP, SAKIP, RENSTRA, RENJA AWAL Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 tepat waktu	10.250.000	8.427.000	1 Tahun	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.640.000	22.440.000	1.200.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil : Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025 tepat waktu	23.640.000	22.440.000	1 Tahun	
7.01.01.2.02	* Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, TPP ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.331.181.000	2.047.981.386	283.199.614	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Hasil : Terlaksananya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Loceret	2.331.181.000	2.047.981.386	1 Tahun	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.400.000	2.376.400	23.600	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Hasil : Tersusunya Laporan Akhir Tahun(LKPD) Tahun 2025 tepat waktu	2.400.000	2.376.400	1 Tahun	
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.800.000	-	1.800.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan LPJ dan Laporan Prognosis) Hasil : Tersusunya Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.800.000	-	1 Tahun	
7.01.01.2.05	* Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Masukan : - Keluaran : - Hasil : -				
7.01.01.2.06	* Administrasi Umum Perangkat Daerah								
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.900.700	9.900.500	200	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik	9.900.700	9.900.500	1 Tahun	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.170.750	48.405.050	765.700	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor	49.170.750	48.405.050	1 Tahun	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.270.000	7.270.000	-	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Fotocopy	7.270.000	7.270.000	1 Tahun	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	6.000.000	-	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Langganan Surat Kabar	6.000.000	6.000.000	1 Tahun	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.132.000	43.698.964	433.036	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Hasil : Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi lintas Sektoral	44.132.000	43.698.964	1 Tahun	
7.01.01.2.07	* Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	66.034.450	55.803.567	10.230.883	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Hasil : Terlaksananya Pengadaan Mebel Kantor Kecamatan Loceret	66.034.450	55.803.567	1 Tahun	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.284.450	35.596.150	2.688.300	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Hasil : Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pengadaan AC, TV Led, Decktop PC dan Printer Ink Tank) Kantor Kecamatan Loceret)	38.284.450	35.596.150	1 Tahun	
7.01.01.2.08	* Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.621.640	104.331.704	12.289.936	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Hasil : Terpenuhinya Pembayaran Honor Upah THL Kecamatan Loceret dan Pembayaran Askes, JKK dan JKM Kantor Kecamatan Loceret	116.621.640	104.331.704	1 Tahun	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000	26.677.653	16.522.347	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Hasil : Terpenuhinya Pembayaran Jasa Listrik dan Telepon Kantor Kecamatan Loceret	43.200.000	26.677.653	1 Tahun	
7.01.01.2.09	* Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.710.250	52.201.500	508.750	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Hasil : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Kantor Kecamatan Loceret	52.710.250	52.201.500	1 Tahun	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	3.983.000	17.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara Hasil : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Mebel yang layak fungsi	4.000.000	3.983.000	1 Tahun	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.650.000	15.550.000	100.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Hasil : Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Komputer dan AC Kantor Kecamatan Lainnya	15.650.000	15.550.000	1 Tahun	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.560.000	29.070.000	26.490.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	55.560.000	29.070.000	1 Tahun	
7.01.02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik***								
7.01.02.2.01	* Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	39.650.000	33.800.000	5.850.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Kantor Kecamatan Loceret (Evaluasi Intensif PBB dan Sosialisasi Kependudukan)	39.650.000	33.800.000	1 Tahun	
7.01.03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan***								
7.01.03.2.01	* Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.600.000	13.260.000	4.340.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Musrenbang Tingkat Kecamatan)	17.600.000	13.260.000	1 Tahun	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta Diwilayah Kerja Kecamatan	54.775.000	51.330.000	3.445.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan Stunting, PKK, Kecamatan Sehat, Kemiskinan Ekstrim dan Pembinaan UMKM Kecamatan)	54.775.000	51.330.000	1 Tahun	
7.01.04	***Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum***								
7.01.04.2.01	* Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diwilayah Kecamatan	42.525.000	27.455.000	15.070.000	Masukan : Dana Yang Dibutuhlan Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Hasil : Terlaksananya Kegiatan Sinergitas dengan Forkopincam, Stabilitas Kewilayahan dan Pembinaan Trantibum)	42.525.000	27.455.000	1 Tahun	

Kode Rekening	Program / Kegiatan	Belanja			Hasil / Kegiatan					Ket.
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan		Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
7.01.05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***									
7.01.05.2.01	* Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	134.275.000	101.184.000	33.091.000	Masukan Keluaran Hasil	: : :	Dana Yang Dibutuhlan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Narkoba, Kekerasan Terhadap Anak, Wawasan Kebangsaan dan Kegiatan HUT RI dan HUT Hari Jadi Kabupaten Nganjuk.	134.275.000	101.184.000	1 Tahun	
7.01.06	***Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***									
7.01.06.2.01	* Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24.703.800	24.393.800	310.000	Masukan Keluaran Hasil	: : :	Dana Yang Dibutuhlan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Terlaksananya Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa di 22 Desa	24.703.800	24.393.800	1 Tahun	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.475.000	9.230.000	245.000	Masukan Keluaran Hasil	: : :	Dana Yang Dibutuhlan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Penyusunan Administrasi Tata Pemerintahan Desa di 22 Desa secara valid dan akuntabel	9.475.000	9.230.000	1 Tahun	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26.590.000	26.067.500	522.500	Masukan Keluaran Hasil	: : :	Dana Yang Dibutuhlan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di 22 Desa	26.590.000	26.067.500	1 Tahun	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.550.000	18.877.500	672.500	Masukan Keluaran Hasil	: : :	Dana Yang Dibutuhlan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di 22 Desa	19.550.000	18.877.500	1 Tahun	
JUMLAH		**3.246.949.040**	**2.825.310.674**	**421.638.366**				**3.246.949.040**	**2.825.310.674**		

Pacet, 31 Desember 2025
CAMAT PACET

SUKIRNO, S.Sos
Pembina
NIP. 19600[illegible]031010

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACET

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Loceret

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.13.0000 - Kecamatan Loceret									Rp3.676.087.504,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.776.552.504,00	Rp3.142.630.140,00	Rp104.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.246.949.040,00	(Rp529.603.464,00)	(16.31)	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp3.676.087.504,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.776.552.504,00	Rp3.142.630.140,00	Rp104.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.246.949.040,00	(Rp529.603.464,00)	(16.31)	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp3.676.087.504,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.776.552.504,00	Rp3.142.630.140,00	Rp104.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.246.949.040,00	(Rp529.603.464,00)	(16.31)	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp2.809.794.454,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.910.259.454,00	Rp2.773.486.340,00	Rp104.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.877.805.240,00	(Rp32.454.214,00)	(1.13)	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp39.240.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.240.000,00	Rp33.890.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.890.000,00	(Rp5.350.000,00)	(15.79)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.600.000,00	Rp10.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.250.000,00	(Rp5.350.000,00)	(52.20)	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.640.000,00	Rp23.640.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.640.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp2.296.018.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.296.018.214,00	Rp2.335.381.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.335.381.000,00	Rp39.362.786,00	1.69	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.291.818.214,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.291.818.214,00	Rp2.331.181.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.331.181.000,00	Rp39.362.786,00	1.69	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.800.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp28.139.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.139.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp28.139.000,00)	(Infinity)	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.139.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.139.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	(Rp28.139.000,00)	(Infinity)	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp137.031.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.031.450,00	Rp116.473.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.473.450,00	(Rp20.558.000,00)	(17.65)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.900.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.900.700,00	Rp9.900.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.900.700,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp58.414.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.414.750,00	Rp49.170.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp49.170.750,00	(Rp9.244.000,00)	(18.80)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp11.874.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.874.000,00	Rp7.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.270.000,00	(Rp4.604.000,00)	(63.33)	
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.842.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.842.000,00	Rp44.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp44.132.000,00	(Rp6.710.000,00)	(15.20)	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp100.465.000,00	Rp0,00	Rp104.318.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.318.900,00	Rp3.853.900,00	3.69	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp66.034.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.034.450,00	Rp0,00	Rp66.034.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.034.450,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp34.430.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.430.550,00	Rp0,00	Rp38.284.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.284.450,00	Rp3.853.900,00	10.07	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp159.821.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.821.640,00	Rp159.821.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp159.821.640,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp116.621.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.621.640,00	Rp116.621.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp116.621.640,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp43.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.200.000,00	Rp43.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.200.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp149.544.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.544.150,00	Rp127.920.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp127.920.250,00	(Rp21.623.900,00)	(16.90)	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp81.534.150,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.534.150,00	Rp52.710.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.710.250,00	(Rp28.823.900,00)	(54.68)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
						Umum (DAU)															
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.000.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp15.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.650.000,00	Rp15.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.650.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp48.360.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.360.000,00	Rp55.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp55.560.000,00	Rp7.200.000,00	12.96	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp128.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.950.000,00	Rp39.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.650.000,00	(Rp89.300.000,00)	(225.22)	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp128.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.950.000,00	Rp39.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.650.000,00	(Rp89.300.000,00)	(225.22)	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp128.950.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.950.000,00	Rp39.650.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp39.650.000,00	(Rp89.300.000,00)	(225.22)	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp135.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.505.000,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	(Rp63.130.000,00)	(87.23)	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp135.505.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.505.000,00	Rp72.375.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp72.375.000,00	(Rp63.130.000,00)	(87.23)	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp31.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.100.000,00	Rp17.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.600.000,00	(Rp13.500.000,00)	(76.70)	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp104.405.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp104.405.000,00	Rp54.775.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.775.000,00	(Rp49.630.000,00)	(90.61)	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp66.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.425.000,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	(Rp23.900.000,00)	(56.20)	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp66.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.425.000,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	(Rp23.900.000,00)	(56.20)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp66.425.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.425.000,00	Rp42.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.525.000,00	(Rp23.900.000,00)	(56.20)	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				Rp339.852.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.852.250,00	Rp134.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.275.000,00	(Rp205.577.250,00)	(153.10)	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				Rp339.852.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.852.250,00	Rp134.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.275.000,00	(Rp205.577.250,00)	(153.10)	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp339.852.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp339.852.250,00	Rp134.275.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp134.275.000,00	(Rp205.577.250,00)	(153.10)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Umum (DAU)															
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp195.560.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.560.800,00	Rp80.318.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.318.800,00	(Rp115.242.000,00)	(143.48)	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp195.560.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp195.560.800,00	Rp80.318.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp80.318.800,00	(Rp115.242.000,00)	(143.48)	
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp58.495.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.495.800,00	Rp24.703.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.703.800,00	(Rp33.792.000,00)	(136.79)	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.525.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.525.000,00	Rp9.475.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.475.000,00	(Rp66.050.000,00)	(697.10)	
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp33.790.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.790.000,00	Rp26.590.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.590.000,00	(Rp7.200.000,00)	(27.08)	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Loceret, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.750.000,00	Rp19.550.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.550.000,00	(Rp8.200.000,00)	(41.94)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp1.247.929.410,00
Februari	Rp47.705.000,00
Maret	Rp47.802.171,00
April	Rp1.244.155.152,00
Mei	Rp600.000,00
Juni	Rp1.450.000,00
Juli	Rp240.369.700,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp1.500.000,00
Oktober	Rp412.987.607,00

Nganjuk, Tanggal 11 Maret 2026
CAMAT LOCERET

SUKIRNO, S.Sos.
NIP. 196908071990031010

Mengesahkan,
PPKD

November	Rp2.450.000,00	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si NIP. 196805111992022001
Desember	Rp0,00	
Jumlah	**Rp3.246.949.040,00**	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

LKjIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN LOCERET
TAHUN 2025

LAMPIRAN

Tautan Bukti Dukung Kinerja

LIST BUKTI DUKUNG LKjIP TAHUN 2025
KECAMATAN LOCERET
KABUPATEN NGANJUK

NO.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja	Realisas 2025	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	**Indikator Tujuan:** Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	83	58,79	70,83	https://drive.google.com/drive/folders/19IacSMMdh5Hjz61Oak5AQEvggLVY7C7R?usp=drive_link - BA Penilaian Sinergitas 2024
	Sasaran : a. Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) b. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**Indikator Sasaran:** a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) b. Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.	Renstra 2024-2026	83,20 100%	86,6 60%	104,08 60%	https://drive.google.com/drive/folders/1RhfvVkpTtbW6r5z21PN9rOLHFwgwjWNq?usp=drive_link - Dokumen Penilaian IKM TW 1 sd TW 3 Tahun 2025 - Laporan Trantibum 2024

2	**Tujuan :** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	**Indikator Tujuan:** Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	82	81,14	98,95	https://drive.google.com/drive/folders/19IacSMMdh5Hjz61Oak5AQEvggLVY7C7R?usp=drive_link - BA Penilaian Sinergitas 2025
	Sasaran : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan c. Meningkatnya tertib administrasi desa	**Indikator Sasaran:** a. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai) b. Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (%) c. Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	84 10 95,45	86,72 60 77,27	103,23 600 80,95	https://drive.google.com/drive/folders/1wxCTKGOg3bIg_ABnC6_lQmEDvloLWcBc?usp=drive_link - Dokumen Penilaian IKM - Laporam Gangguan Trantibum 2025 - Laporan Monev Seksi Binwas

NO.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan	Target Kinerja	Realisas 2025	Capaian (%)	Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah**	Renstra 2024-2026	83,20	86,6	104,08	https://drive.google.com/drive/folders/1RhfvVkpTtbW6r5z21PN9rOLHFwgwjWNq?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**		**7**	**7**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1-27UuQDHHQzyAXV3GbPEi-2J5GpWaSo5?usp=drive_link
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	5	100	Renstra, Renja, DPA, DPPA 1 dan DPPA 2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD		2	2	100	Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**41**	**41**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1VRxQf9MJhn7iUJnpCisXbY0N3fmgdAxk?usp=drive_link
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		15	15	100	Dokumen Usulan Gaji dan TPP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100	Laporan LKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12	12	100	Laporan Fungsional Bulan Januari sd Desember 2025

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0**	**0**	**0**	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**12**	**12**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1tjKvNSmuS6l5Dv-hCs5AOj-woFVL9-wJ?usp=drive_link
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		12	6	50	Dokumentasi Paket Komponen Listrik (Anggaran ada efisiensi dan target belum disesuaikan pada Renstra)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		12	6	50	Dokumentasi Paket Bahan Logistik (Anggaran ada efisiensi dan target belum disesuaikan pada Renstra)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		2	2	100	Dokumentasi Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		4	4	100	Dokumen bukti pembayaran Tabloid/ Majalah/ Koran tw 1 sd tw 4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		12	12	100	Notulen Rapat dan Koordinasi Tahun 2025
	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	0	0	-

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan**		**26**	**26**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1tjKvNSmuS6l5Dv-hCs5AOj-woFVL9-wJ?usp=drive_link
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		20	20	100	Dokumentasi Paket pengadaan mebel Tahun 2025
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		6	6	100	Dokumentasi Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**24**	**24**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/12bNApGWELWZgwbcNwTFbjCDthNJCj3O0?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	100	Laporan Pengelolaan Distribusi Surat 2025
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan		12	12	100	Laporan rekap bukti pembayaran Listrik selama 12 bulan tahun 2025
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara**		**43**	**43**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1_voLXKIadyAyqnLnNzAf9dvJRjZ_5yWr?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	2	100	Dokumentasi Kendaraan yang dibiayai Pajak dan Pemeliharaannya Bukti Pembayaran BBM Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2025
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara		20	20	100	Dokuemntasi Mebel yang dilakukaan Pemeliharaan Tahun 2025
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara		20	20	100	Dokumentasi Peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan tahun 2025

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	100	Dokumentasi Gedung yang dilakukan pemeliharaan Tahun 2025
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib**		**100%**	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/16VOLsMfO9J0MiOjqdTkagxp5bimapI3Z?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**3**	**3**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/16VOLsMfO9J0MiOjqdTkagxp5bimapI3Z?usp=drive_link
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait		3	3	100	- Laporan Kegiatan Sosialisasi PBB - Laporan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan - Laporan Keg.Percepatan Penyelesaian PBB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**		**100%**	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/150Jm7y8wi4nDcLAvOKfMFQHn00ysZt6K?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan**		**11**	**11**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/150Jm7y8wi4nDcLAvOKfMFQHn00ysZt6K?usp=drive_link
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		11	11	100	Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang diikuti oleh perwakilan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan		3	3	100	- Laporan Kegiatan PKK - Laporan Kegiatan Kemiskinan Ekstrim - Laporan Kegiatan Kecamatan Sehat

	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1sb1TKiWSyMIIi9ih3K_7LS3rxZ62b7p7?usp=drive_link
	Koordinasi Up aya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**12**	**12**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1sb1TKiWSyMIIi9ih3K_7LS3rxZ62b7p7?usp=drive_link
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan		**12**	12	100	Laporan Gangguan Trantibum per bulan yang terlapor di Kecamatan Tahun 2025
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1PMqQiw94iEe-xMbtseK7RbC0hJ_LKl_Z?usp=drive_link
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**		**11**	**11**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1PMqQiw94iEe-xMbtseK7RbC0hJ_LKl_Z?usp=drive_link
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		**120**	120	100	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun 2025

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang**		95,45%	95,45%	100	https://drive.google.com/drive/folders/1JH1MbQBpZD4PHVdi2_FcaAfZ85YkkHFI?usp=drive_link
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang Tertib Administrasi**		22	17	77,27	https://drive.google.com/drive/folders/1JH1MbQBpZD4PHVdi2_FcaAfZ85YkkHFI?usp=drive_link
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4	4	100	- Laporan Kegiatan Sosialisasi Perdes Aset KDMP - Laporan Kegiatan P APBDes - Laporan Keg.Evaluasi APBDes Bersama Dinas PMD - Laporan Kegiatan APBDes Tk.Kecamatan
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		1	1	100	- Laporan Evaluasi P RPJMDes
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		3	3	100	- Laporan Bimtek Indeks Desa - Laporan Bimtek Pajak Administrasi Desa - Laporan Kegiatan Sos Cotex
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		2	2	100	- Laporan RKPDesa Kecamatan - Laporan Evaluasi RKPDes Tk Kab
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	Renstra 2025-2029	84	86,72	103,23	https://drive.google.com/drive/folders/1wxCTKGOg3bIg_ABnC6_IQmEDvloLWcBc?usp=drive_link
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**		**7**	**7**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1-27UuQDHHQzyAXV3GbPEi-2J5GpWaSo5?usp=drive_link
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5	5	100	Renstra, Renja, DPA, DPPA 1 dan DPPA 2

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasai Kinerja SKPD		2	2	100	Dokumen Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**41**	**41**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1VRxQf9MJhn7iUJnpCisXbY0N3fmgdAxk?usp=drive_link
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN		15	15	100	Dokumen Usulan Gaji dan TPP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	100	Laporan LKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		12	12	100	Laporan Fungsional Bulan Januari sd Desember 2025
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**0**	**0**	**0**	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**12**	**12**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1tjKvNSmuS6l5Dv-hCs5AOj-woFVL9-wJ?usp=drive_link
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		12	6	50	Dokumentasi Paket Komponen Listrik (Anggaran ada efisiensi dan target belum disesuaikan pada Renstra)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		12	6	50	Dokumentasi Paket Bahan Logistik (Anggaran ada efisiensi dan target belum disesuaikan pada Renstra)

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan		2	2	100	Dokumentasi Paket Barang Cetakan dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan		4	4	100	Dokumen bukti pembayaran Tabloid/ Majalah/ Koran tw 1 sd tw 4
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		12	12	100	Notulen Rapat dan Koordinasi Tahun 2025
	Penata Usahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0	0	0	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan**		**26**	**26**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1tjKvNSmuS6l5Dv-hCs5AOj-woFVL9-wJ?usp=drive_link
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		20	20	100	Dokumentasi Paket pengadaan mebel Tahun 2025
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		6	6	100	Dokumentasi Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**24**	**24**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/12bNApGWELWZgwbcNwTFbjCDthNJCj3O0?usp=drive_link
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	12	100	Laporan Pengelolaan Distribusi Surat 2025
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan		12	12	100	Laporan rekap bukti pembayaran Listrik selama 12 bulan tahun 2025
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara**		**43**	**43**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1_voLXKIadyAyqnLnNzAf9dvJRjZ_5yWr?usp=drive_link

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		2	2	100	Dokumentasi Kendaraan yang dibiayai Pajak dan Pemeliharaannya Bukti Pembayaran BBM Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tahun 2025
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara		20	20	100	Dokuemntasi Mebel yang dilakukaan Pemeliharaan Tahun 2025
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara		20	20	100	Dokumentasi Peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan tahun 2025
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	100	Dokumentasi Gedung yang dilakukan pemeliharaan Tahun 2025
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)**		**100%**	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/16VOLsMfO9J0MiOjqdTkagxp5bimapI3Z?usp=drive_link
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**3**	**3**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/16VOLsMfO9J0MiOjqdTkagxp5bimapI3Z?usp=drive_link
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait		3	3	100	- Laporan Kegiatan Sosialisasi PBB - Laporan Kegiatan Sosialisasi Kependudukan - Laporan Keg.Percepatan Penyelesaian PBB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan**		**100%**	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/150Jm7y8wi4nDcLAvOKfMFQHn00ysZt6K?usp=drive_link
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan**		**11**	**11**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/150Jm7y8wi4nDcLAvOKfMFQHn00ysZt6K?usp=drive_link

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		11	11	100	Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang diikuti oleh perwakilan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan		3	3	100	- Laporan Kegiatan PKK - Laporan Kegiatan Kemiskinan Ekstrim - Laporan Kegiatan Kecamatan Sehat
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani**		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1sb1TKiWSyMIIi9ih3K_7LS3rxZ62b7p7?usp=drive_link
	Koordinasi Up aya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**		**12**	**12**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1sb1TKiWSyMIIi9ih3K_7LS3rxZ62b7p7?usp=drive_link
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan		**12**	12	100	Laporan Gangguan Trantibum per bulan yang terlapor di Kecamatan Tahun 2025
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**		100	100	100	https://drive.google.com/drive/folders/1PMqQiw94iEe-xMbtseK7RbC0hJ_LKI_Z?usp=drive_link
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan**		**11**	**11**	**100**	https://drive.google.com/drive/folders/1PMqQiw94iEe-xMbtseK7RbC0hJ_LKI_Z?usp=drive_link

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		**120**	120	100	Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Tahun 2025
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Desa (%)**		95,45%	77,72	81,42	https://drive.google.com/drive/folders/1JH1MbQBpZD4PHVdi2_FcaAfZ85YkkHFI?usp=drive_link
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**		22	17	77,27	https://drive.google.com/drive/folders/1JH1MbQBpZD4PHVdi2_FcaAfZ85YkkHFI?usp=drive_link
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		4	4	100	- Laporan Kegiatan Sosialisasi Perdes Aset KDMP - Laporan Kegiatan P APBDes - Laporan Keg.Evaluasi APBDes Bersama Dinas PMD - Laporan Kegiatan APBDes Tk.Kecamatan
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		1	1	100	- Laporan Evaluasi P RPJMDes
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		3	3	100	- Laporan Bimtek Indeks Desa - Laporan Bimtek Pajak Administrasi Desa - Laporan Kegiatan Sos Cotex

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		2	2	100	- Laporan RKPDesa Kecamatan - Laporan Evaluasi RKPDes Tk Kab

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

LKjIP

KECAMATAN LOCERET

TAHUN 2025

